



Available online at **FACTUM**; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>
FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 9 (2). 2020. 147-160

RESEARCH ARTICLE

**GARDA PERDAMAIAN DUNIA: PERANAN KONTINGEN
GARUDA II SEBAGAI PASUKAN PERDAMAIAN DI REPUBLIK
KONGO (1960-1961)**

Oleh :
Wisnu Arsa Tanjung, Murdiah Winarti¹

Naskah diterima : 19 Juni 2020, Naskah direvisi : 28 Agustus 2020 Naskah disetujui : 20 September 2020

To cite this article: Tanjung, W.A., dan Winarti, M. (2020). Garda perdamaian dunia: peranan kontingen garuda ii sebagai pasukan perdamaian di republik kongo. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 9 (2). 2020. 147-160, DOI: <https://doi.org/10.17509/factum.v9i2.25588>.

ABSTRACT

The main problem discussed in this article is how the efforts carried out by the Garuda II contingent in the Republic of the Congo. The purpose of this study is to examine more closely the involvement of the Garuda II contingent in the Republic of the Congo both regarding preparations for carrying out tasks in the Republic of the Congo and the activities carried out by the Garuda II contingent while in the Republic of the Congo in 1960 to 1961. The research method used is a historical method that includes several steps, namely heuristics (collecting sources) both oral and written sources, source criticism, interpretation, and historiography. To deepen the analysis, the authors use the approach of the science of sociology, the science of international relations. The research technique used is the study of literature. Based on the results of the study, the Indonesian Government participated in sending peacekeepers to the Republic of Congo under the auspices of the United Nations in 1960 is one implementation of the political spirit of anti-colonialism and imperialism by implementing a free and active foreign policy. Activities were undertaken by the Garuda II Contingent Forces namely overcoming and mediating the rebellions that occurred in the Republic of Congo such as overcoming the battle of sending Garuda Contingent II to Boende and Coquihalville City, the battle of Kamina, the explosion of mines in Kamina and overcoming the movement of separatism in Katanga Province. Besides, conducting patrols to the Bikoro area, Igende. From these activities, the Garuda II Contingent Forces succeeded in carrying out their duties to have a very positive impact on the troops. Indonesian contingent so that the following year the Indonesian Government sent the Garuda Contingent back in 1962.

Keyword: Battle of Kamina, Garuda II Troops, Republic of the Congo, The Spartat Movement.

¹Wisnu Arsa Tanjung adalah mahasiswa pada Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI dan Murdiah Winarti adalah Dosen Pembimbing. Penulis dapat dihubungi di email: wisnuarsatanjung17@gmail.com.

PENDAHULUAN

Dalam proses bangsa-bangsa Afrika untuk melawan imperialisme dan kolonialisme untuk mendapatkan kemerdekaan sering terjadi konflik. Peran signifikan Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Afrika salah satunya dengan mengirimkan pasukan perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seperti yang diketahui Indonesia merupakan negara menganut anti imperialisme dan kolonialisme hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan luar negeri Indonesia yang menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Kebijakan tersebut merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek aspek internal suatu negara. Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran pentingnya dalam hubungan internasional. Implementasi dari semangat politik anti imperialisme dan kolonialisme dalam kebijakan politik bebas aktif terbukti dengan dilaksanakannya Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955. Konferensi ini merupakan inisiatif Indonesia bersama negara lain yaitu Sri Lanka, Pakistan, India dan Myanmar.

Pertemuan internasional bangsa-bangsa Asia Afrika ini bertujuan untuk menggalang solidaritas bangsa-bangsa dunia ketiga khususnya di benua Asia dan Afrika yang saat itu masih berada dalam penjajahan bangsa-bangsa barat. Hal ini dibuktikan dengan memperbesar peranan Asia Afrika dalam dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian

dunia serta memecahkan bersama soal-soal khusus dan penting bagi bangsa-bangsa Asia Afrika, seperti: kedaulatan, menghapuskan diskriminasi dan penjajahan. Pada dasarnya kebijakan ini dilandasi dengan dasar saling hormat-menghormati satu sama lain, bekerja sama membentuk satu “dunia baru” yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna (Dahana, A, dkk, 2012, hlm. 401).

Dalam tulisan ini peneliti memfokuskan upaya pemerintah Indonesia dalam membantu mengatasi krisis di Republik Kongo melalui pengiriman Pasukan Garuda pada tahun 1960. Ketertarikan peneliti dalam masalah penyelesaian krisis di Republik Kongo dengan keikutsertaan Indonesia menjadi alasan peneliti untuk mengkaji penelitian ini. Republik Kongo pada tahun 1960 masih dalam penjajahan negara Belgia, atas mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan kemerdekaan Republik Kongo dari Belgia karena adanya tekanan dan desakan yang semakin kuat dari negara-negara Asia Afrika yang telah merdeka. Desakan itu juga merupakan salah satu dampak dari pelaksanaan konferensi Asia Afrika lima tahun sebelumnya. Setelah mendapatkan kemerdekaan, negara ini dilanda konflik karena ketidakrelaan Belgia sebagai bekas penjajahnya yang menolak untuk meninggalkan Republik Kongo. Dampak dari perbedaan pandangan antara pemerintah kolonial Belgia dengan pemerintah sipil yang baru terbentuk di Republik Kongo adalah terjadinya konflik sipil bahkan militer. Dalam konflik tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa berusaha menengahi dengan mengirimkan

pasukan perdamaian yang dikenal sebagai *Opération des Nations Unies au Congo* (ONUC) dimana tiga belas negara ikut serta dalam misi tersebut, termasuk Indonesia.

Keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam misi perdamaian dunia pada tahun 1960 ini menarik untuk dikaji lebih dalam dari aspek peran serta dan dampaknya terhadap keikutsertaan tersebut.

METODE

Metode adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk pemecahan suatu masalah dengan menggunakan teknik dan alat tertentu sebagai unsur penelitian. Metode yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan adalah menggunakan metode historis dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Metode historis menurut Siswojo (1987, hlm. 75) mengemukakan bahwa penelitian historis (*historical research*) adalah suatu usaha untuk menggali fakta-fakta dan menyusun kesimpulan dan peristiwa-peristiwa masa lampau. Sedangkan menurut Sjamsuddin (2012, hlm. 11) mengemukakan bahwa metode historis adalah suatu proses, prosedur atau teknik dalam meneliti suatu disiplin ilmu secara sistematis untuk mendapatkan objek yang akan diteliti. Dapat ditarik kesimpulan bahwa metode historis merupakan metode yang digunakan dalam suatu penelitian terhadap peristiwa masa lalu yang disusun menggunakan disiplin ilmu dan secara sistematis yang disajikan secara tertulis. Adapun tahapan tersebut terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Tahap pertama adalah heuristik, Proses pencarian sumber ini merupakan suatu langkah awal dalam melakukan penelitian. Pencarian sumber dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari hasil karya ilmiah penulis lain, baik berupa tulisan yang sudah dicetak dalam bentuk buku maupun artikel-artikel yang terdapat dalam situs-situs internet. Usaha yang dilakukan oleh peneliti pada tahap ini adalah dengan berkunjung ke perpustakaan, hal yang dilakukan ialah mencatat sumber baik dari buku, maupun artikel yang berhubungan dengan penelitian. Adapun dalam pencarian sumber, peneliti mencari ke beberapa perpustakaan-perpustakaan, diantaranya Perpustakaan Angkatan Darat, perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, Perpustakaan Batu Api dan Perpustakaan Museum Asia-Afrika. Tahapan berikutnya kritik sumber, dibagi menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik internal. Menurut Sjamsuddin (2012, hlm. 134) mengemukakan bahwa kritik eksternal penelitian atas asal-usul dari sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin dan untuk mengetahui apakah pada suatu waktu sejak asal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang tertentu atau tidak. Dalam melakukan kritik ekstern terhadap sumber-sumber tertulis berupa buku-buku, penulis tidak melakukan proses kritik sumber terlalu ketat dengan pertimbangan bahwa buku-buku maupun jurnal tersebut merupakan sumber sekunder hasil cetakan yang didalamnya akan memuat nama penulis, tahun terbit, penerbit dan tempat buku tersebut diterbitkan. Dengan kriteria tersebut maka dapat dianggap sebagai

salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan buku yang telah diterbitkan.

Dengan demikian peneliti melakukan pencarian sumber di Balai Dokumen Dinas Sejarah TNI AD kota Bandung dimana peneliti menemukan beberapa arsip surat-surat keputusan, laporan penugasan, laporan bulanan yang berkaitan dengan penelitian. Sumber-sumber primer yang diperoleh di Balai Dokumen Dinas Sejarah TNI AD kota Bandung berupa surat keputusan keberangkatan Kontingen Garuda II ke Republik Kongo pada tahun 1960, laporan persiapan yang dilakukan oleh Kontingen Garuda untuk bertugas di Republik Kongo, laporan bulanan penugasan Kontingen Garuda II, laporan hasil pelaksanaan tugas Kontingen Garuda II, laporan umum pelaksanaan tugas Kontingen Garuda III dan yang terakhir laporan penugasan Kontingen Garuda III. Arsip surat-surat dan laporan tersebut dari tahun 1960 sampai tahun 1963 berisikan mengenai penugasan yang dilakukan oleh Kontingen Garuda II dan III ke Republik Kongo diketik rapih dan tulisannya pun masih terbaca dengan ejaan Republik, meskipun kertas surat dan laporan sudah menguning dan rapuh. Arsip dan laporan tersebut, merupakan dokumen asli yang ada di Balai Dokumen Dinas Sejarah TNI AD kota Bandung, sehingga peneliti tidak perlu menguji keasliannya kembali. Sedangkan kritik internal pada sumber tertulis yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan cara membaca keseluruhan isi sumber bacaan dari buku maupun jurnal dan kemudian membandingkannya dengan sumber lainnya.

Setelah melakukan beberapa langkah tahapan dari metode penelitian sejarah dari heuristik, kritik sumber, maka langkah selanjutnya adalah interpretasi atau analisis sejarah. Pada tahapan ini peneliti mengolah dan menganalisis seluruh informasi dan fakta yang sudah didapat dari sumber-sumber yang telah diperoleh dan sudah dilakukan kritik sumber. Pada tahap ini peneliti mengkomunikasikan hasil penelitian yang telah melalui tiga tahap sebelumnya dalam sebuah karya tulisan berupa artikel jurnal.

PEMBAHASAN

Republik Kongo merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Afrika Tengah. Pada tanggal 30 Juni 1960, Republik Kongo merdeka dari Belgia. Hal ini mendapatkan bantuan dari Perserikatan Bangsa Bangsa untuk memberikan kemerdekaan Republik Kongo dari Belgia karena adanya tekanan dari gerakan anti-kolonial di seluruh dunia yang menyentuh Afrika pada tahun 1950-an. Kemudian diselenggarakannya pemilihan umum parlemen, dalam pemilu ini ada dua partai yang sangat berkuasa diantaranya, partai *Mouvement National Congolais* (MNC), partai ini yang memenangkan pemilihan umum parlemen yang dipimpin oleh Patrice Lumumba dan menjadikannya sebagai Perdana Menteri, sedangkan Joseph Kasavubu dari partai *Alliance des Bakongo* (ABAKO) terpilih sebagai Presiden.



Gambar. 6.1

Peta Wilayah Republik Kongo

Sumber: *Passemiars, L. (2016). South Africa and the 'Congo Crisis', 1960-1965. The Faculty Of The Humanities At The University Of The Free State.*

Setelah mendapatkan kemerdekaan, negara ini dilanda permasalahan yang dilatarbelakangi dari adanya perpecahan nasional bahkan ada gerakan separatisme, dimana Provinsi Katanga ingin memisahkan diri dari negara Republik Kongo. Gubernur Katanga yaitu Moise Tshombe, mendeklarasikan pemisahan provinsi Katanga dari negara Republik Kongo pada tanggal 11 Juli 1960. Pemisahan tersebut didukung oleh perusahaan pertambangan di Provinsi Katanga yang bernama *Union Minière du Haut-Katanga* (UMHK) dan dari Belgia. Kemudian Belgia mengirimkan pasukan tentaranya ke Provinsi Katanga. Kehadiran tentara ini berada di Republik Kongo, khususnya di Provinsi Katanga selama bertahun-tahun, sehingga rakyat pribumi yang bertempat tinggal di Provinsi Katanga tidak pernah benar-benar merasakan kebebasan atau kemerdekaan. Hal ini seperti yang

dikemukakan oleh Hochschild (dalam Lusignan, 2003, hlm. 7) mengemukakan bahwa:

“Belgium immediately sent troops to the country in order to protect Katanga, the city in the Congo that possessed a wealth of resources and was the primary export site for these corporations. With this military presence, the corporations continued their production in the city, and surprisingly, production even increased in the year of independence. This military presence remained in the Congo for years, thus showing the Congolese people were never truly granted “independence.”

Selain itu, permasalahan baru muncul yaitu terjadinya kekacauan di berbagai tempat karena keadaan rakyat Republik Kongo sendiri yang belum siap menerima kemerdekaan yang diberikan oleh negara Belgia. Selain itu, pemberontakan di Leopoldville diantara anggota tentara Republik Kongo, yang kemudian dikenal sebagai *Force Publique*. Pemberontakan tersebut menyebar ke Camp Hardy di Thysville, hal ini dikarenakan para prajurit tentara Republik Kongo tidak puas dengan kondisi, gaji, pangkat, dan merasa bahwa mereka tidak mendapatkan keuntungan dari kemerdekaan tidak seperti perwakilan pemerintah lainnya. Serta masih banyak lagi konflik yang terjadi di Republik Kongo Kasavubu dan Lumumba sebagai presiden dan perdana menteri, kemudian meminta bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Republik Kongo. Pada tanggal 13 Juli 1960, Sekretaris Jenderal Dewan

Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu Dag Hammarskjold membuat keputusan untuk menarik pasukan tentara Belgia dari Kongo dan memberi wewenang bantuan militer untuk membantu Tentara Nasional Kongo dalam memulihkan ketertiban. Pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Kongo dikenal sebagai *Opération des Nations Unies au Congo* (ONUC). Dimana tiga belas negara mengirimkan pasukan perdamaian PBB dan salah satunya yaitu Indonesia.

Alasan pemerintah Republik Indonesia mengirimkan pasukan tentaranya ke Republik Kongo yaitu untuk membantu menyelesaikan konflik dan disamping itu agar Indonesia semakin dikenal di dunia Internasional khususnya dalam bidang militer. Dengan berpartisipasi aktif melalui pengiriman pasukan perdamaianya, Indonesia dapat disegani dan dikenal di kancah Internasional, disamping merupakan bentuk implementasi politik luar negeri bebas aktif yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI alinea ketiga, antara lainnya berbunyi: "...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...".

Selain adanya konflik yang terjadi di Republik Kongo, adanya kebijakan politik luar negeri bebas aktif pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1960 menjadi salah satu latar belakang dikirimkannya pasukan

perdamaian Indonesia ke Republik Kongo. Kebijakan ini tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek aspek internal suatu negara. Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran pentingnya dalam hubungan internasional. Pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut anti imperialisme-kolonialisme. Hal ini dibuktikan dengan adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan semangat politik anti imperialisme-kolonialisme dilaksanakannya pertemuan internasional di Indonesia pada tahun 1955 yaitu Konferensi Asia-Afrika. Hal ini bertujuan untuk menyerukan solidaritas dari negara Asia-Afrika yang sudah merdeka untuk melawan imperialisme-kolonialisme serta adanya persepsi ancaman dari pemerintah Indonesia terhadap dunia mengenai perdamaian dunia yang diungkapkan oleh Presiden Soekarno. Selain itu, adanya pola persahabatan Pemerintah Indonesia dengan negara-negara Afrika salah satunya Republik Kongo yang masih berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan yang sepenuhnya, serta pola permusuhan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme di Republik Kongo. Seperti yang diketahui bahwa arah politik luar negeri Indonesia pada saat ini masih ingin mewujudkan kemerdekaan sepenuhnya demi menjalankan revolusinya berdasarkan akan sikap bebas dan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dalam upaya-upaya menghimpun kawan yang dikonfrontasikan dalam menghadapi

imperialisme dan kolonialisme. Kebijakan politik luar negeri Indonesia berarah ke tujuan-tujuan dan pandangan-pandangan Presiden Soekarno dalam menciptakan kekuatan-kekuatan diplomasi, militer dan keamanan Negara demi melawan imperialisme, kolonialisme (Ariyantoro, 2018, hlm. 164).

Sebelum melaksanakan tugas sebagai pasukan perdamaian, pemerintah Indonesia harus mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan di Republik Kongo, yang dipersiapkan yakni perlengkapan perorangan maupun kesatuan atau kelompok serta dilakukan harus secara terperinci karena pada saat penugasan sebelumnya yaitu Kontingen Garuda I di Mesir pada tahun 1957 mengalami perencanaan dan persiapan tidak sempurna terutama dalam hal finansial dan material. Maka dari itu, adanya usulan agar penugasan Batalyon selanjutnya tidak lebih dari enam bulan serta diperlukannya penambahan tenaga untuk Batalyon yang akan bertugas di Republik Kongo, yakni penambahan bintanga-bintang *welfare* atau yang sering disebut dengan kesejahteraan bintanga. Peranan bintanga ini sangat penting, karena dengan adanya bintanga *welfare*, pasukan yang akan bertugas di Republik Kongo mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sehingga dibentuknya Perwira Seksi 3 yang bertugas sebagai perwira *welfare* untuk pengurusan toko tentara dan kantin. Kemudian memetakan kebutuhan seorang dokter, bertujuan untuk memelihara kesehatan anggota Batalyon dan bantuan paramedis di lapangan pada saat bertugas. Disamping

itu, dibentuk juga tenaga kerohanian dari berbagai agama yakni agama Islam, Katolik dan Protestan yang bertujuan untuk pemeliharaan dalam bidang rohani serta yang terakhir yaitu diperlukannya seorang tentara pemakaman untuk mengurus pemakaman.

Selain penambahan-penambahan tenaga untuk Batalyon, Menurut Surat Turunan Peninjauan Personil Angkatan Darat Komando Daerah Militer VI "Siliwangi" SP. 004/D/I/02 (1960) menyatakan bahwa adanya saran-saran penyelesaian pada tingkat MABAD (Markas Besar Angkatan Darat) adalah perlu menempatkan tenaga-tenaga dalam kantor pusat ONUC. Karena pada saat penugasan Pasukan Garuda I tidak adanya tenaga-tenaga dari Indonesia di bidang perawatan dan staf ONUC, sehingga menimbulkan kesukaran seperti halnya dalam bidang logistik. Tenaga-tenaga yang berada di kantor pusat ONUC itu juga harus melayani pasukan-pasukan dari negara lain, tetapi dengan adanya tenaga-tenaga dari Indonesia akan mempermudah hubungan antara pasukan-pasukan Indonesia dengan kantor pusat ONUC. Selain itu, mengusahakan pelayanan yang baik dan membela kepentingan-kepentingan pasukan dari Indonesia. persiapan-persiapan tersebut harus diselesaikan pada tanggal 28 Agustus 1960. Selain itu, menurut Laporan Umum Kesehatan Pasukan Garuda II Kontingen Indonesia (1960) adanya persiapan dalam bidang kesehatan yaitu mempersiapkan berupa imunisasi (tetanus *anatoxin*, *Chotypa*, dan koepokstof *vaccin*) dan dilakukannya *screen* di rumah sakit Dustira yang berjumlah 1045 anggota,

dibagi menjadi dua gelombang pada pelaksanaannya. Kemudian hasil dari dilakukannya *screen* terdapat 17 anggota tidak dapat mengikuti tugas ke Republik Kongo.

Perlu disadari bahwa tugas dari Batalyon Indonesia bersamaan dengan negara lain yang ikut serta dalam pasukan perdamaian. Maka, tidak dapat dipungkiri akan adanya persaingan positif maupun negatif. Selain bertugas sebagai pasukan perdamaian, serta tugas tambahan representatif sebagai duta dalam bidang-bidang politik dan militer, dari sinilah dapat diukur tingkatan dan kemampuan dalam bidang militer suatu negara.



Gambar 6.2

Keberangkatan Kontingen Garuda II

Sumber: *Buku Kontingen Garuda Indonesia dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB*

Pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas ke Republik Kongo pada tahun 1960 disebut dengan pasukan Kontingen Garuda II, yang dipimpin oleh Letkol. Solihin Gautama Purwanegara. Pasukan Indonesia mengirimkan Batalyon 330/ Kujang O Siliwangi serta satu detasemen Polisi Militer dan satu Peleton KKO ALRI

yang penugasannya berdasarkan Surat Keputusan Kasad No: Kpts-775/8-1960 tanggal 8 September 1960 (Imran, 1971, hlm. 128). Kemudian pasukan Kontingen Garuda II dilantik dan diresmikan dalam suatu upacara pelepasan pasukan oleh Menteri Keamanan Nasional Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal A.H. Nasution pada tanggal 9 September 1969. Keesokan harinya, pasukan ini diberangkatkan dari Tanjung Priok serta diadakannya upacara perpisahan, yang turut hadir dalam upacara tersebut adalah ibu Fatmawati, Ibu Nasution, Brigadir Jendral Ahmad Yani, Kolonel Yos Sudarso, Kolonel Mursid dan keluarga Pasukan Kontingen Garuda II. Kendaraannya menggunakan kapal USS *Bexar*, berupa kapal Charter dari Armada VII Amerika Serikat.

Setelah tiba di Republik Kongo, berbagai tugas dijalankan oleh pasukan Garuda II. Mulai dari menjaga kantor Supreme Commander, pengawalan uang dari Bank hingga mengatur lalu lintas. Pada awalnya, bertugas di daerah asing tentu dirasa berat, terutama ketika harus berinteraksi dengan masyarakat, dengan bahasanya yang memang belum kenal, tetapi karena kemauan yang keras, kesulitan-kesulitan itu dapat diatasi (Dinas Provost TNI Angkatan Darat, 1981, hlm. 249). Selain itu, pasukan Kontingen Garuda II diturunkan ke beberapa wilayah konflik seperti ke Provinsi Equateur dan Boende. Daerah Equater merupakan sering terjadi pemberontakan dan kekacauan terbesar yang terjadi di Republik Kongo, namun demikian dalam waktu sebulan pasukan Kontingen Garuda II berhasil menguasai dan mengatasi kekacauan tersebut.

Anggota-anggota pasukan Kontingen Garuda II yang bertugas di Provinsi

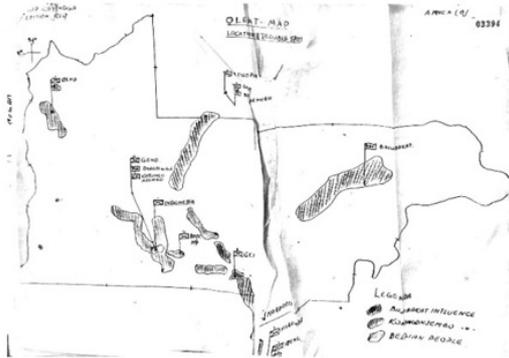
Equater yaitu di Coquethaville, selain melakukan tugas-tugas rutin disertai tugas untuk menjaga lapangan terbang. Pasukan Kontingen Garuda II bertindak dan berlaku tegas terhadap setiap kejadian yang dihadapi. Hal ini dibuktikan ketika memberikan perlindungan terhadap menteri dari kabinet gubernur provinsi, yang mendapat serangan dari segerombolan serdadu ANC (*Armee Nationale Congolise*). Serangan yang ditujukan dengan menghancurkan mobil para menteri, menggunakan kayu besar sebagai alat pemukulnya serta menganiaya rakyat yang berada di sekitar tempat kejadian. Menyikapi aksi tersebut, pasukan Kontingen Garuda II segera menyelamatkan jiwa para menteri dan mengusir mereka dari sana dan seterusnya disuruh kembali ke asramanya (Dinas Provoost TNI Angkatan Darat, 1981, hlm. 250). Sementara itu terjadi kerusuhan-kerusuhan pasukan Tentara Republik Kongo yang menyerang pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Leopoldville. Sehingga Jendral Von Horn meminta Pasukan Kontingen Garuda II untuk mengirimkan satu Peleton Infanteri dan satu Peleton AT berangkat menuju daerah tersebut. Pada saat melaksanakan tugasnya, dalam waktu yang relatif singkat dan cepat, Pasukan Kontingen Garuda II berhasil mengatasi dan meredakan Tentara Republik Kongo sehingga keadaan di Leopoldville kembali tenang dan kondusif.

Kemudian pasukan Kontingen Garuda II mendapatkan tugas kembali, yaitu mengatasi pertempuran yang terjadi di daerah Kamina. Pada umumnya situasi di daerah Kamina sangat berbeda dengan yang lainnya, dikarenakan daerah yang sering disebut dengan Distrik Kamina

merupakan salah satu bagian dari negara Katanga yang memisahkan diri dari negara Republik Kongo. Terjadi pertempuran antara 2 kelompok yaitu Pasukan Balubakat (pasukan gerilya anti Katanga) dengan Pasukan Gandameri Katanga (pasukan pendukung Katanga). Dimana pertempuran tersebut berhasil diatasi oleh pasukan Kontingen Garuda II dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Strategi yang dilakukan oleh pasukan Kontingen Garuda II dalam menghadapi musuh tidak dengan melakukan pembalasan tembakan, namun hanya dengan aksi-aksi sergapan. Hal ini dibuktikan ketika melawan Pasukan Gandameri Katanga, pasukan Kontingen Garuda II hanya melakukan penyergapan serta ancaman kepada pimpinan pasukan tersebut dengan cara todongan pisau yang berhasil menekan perwira tersebut untuk memerintahkan pasukannya menghentikan penembakan.

Secara bersamaan dengan kerusuhan di daerah Leopoldville, terjadi pula kerusuhan di Pangkalan Udara di daerah Kamina. Pasukan Balubakat yang mendukung Lumumba bertempur melawan pasukan Gandameri Katanga yang dipimpin oleh perwira-perwira dari Belgia. Sebelumnya, Pasukan ONUC yang ditempatkan di daerah yang sedang terjadi pemberontakan belum mampu mengatasi. Sehingga Jendral Von Horn meminta bantuan ke Pasukan Kontingen Garuda II. Kemudian, mengirimkan segera Kompi 2 diberangkatkan ke Kamina, Pasukan Kontingen Garuda II berhasil dengan cepat menduduki Kamina, dalam waktu kurang dari sebulan pasukan kompi 2 berhasil menciptakan keadaan aman, akan tetapi setelah itu timbul lagi kerusuhan di daerah Kamina bagian utara. Detasemen Ethiopia

terdesak dan terkurung oleh pasukan Gandameri Katanga, Kompi 2 kembali ditugaskan di daerah tersebut (Imran & Ugaya, 1971, hlm. 129).



Legenda

Pasukan Balubakakat
Pasukan Kasongo Njembo
Tentara Belgia

Gambar 6.3

Peta Wilayah Penempatan Kontingen Garuda II di Kamina

Sumber: Lampiran Laporan Periodik No. SH-001/II/II/1960

Menurut Surat Risalah Kejadian No. P-02/II/1/191 pada tanggal 14 Desember terjadinya peristiwa ledakan ranjau di Kamina tepatnya di jembatan Lungia yang menewaskan satu orang dari pasukan Kontingen Garuda II yaitu yaitu Prds. Basari serta dua orang luka-luka yaitu Sersd G. Simanjuntak dan Prds. Syarif. Pasukan Kontingen Garuda II mendapatkan perintah untuk melakukan patroli ke daerah Kamina, di sekitar jembatan Lungia terdapat ranjau di pinggir kiri dan kanan jalan dekat jembatan serta di pinggir sungai dari kedua tepi, Ranjau tersebut dipasang oleh pasukan Gandamerie pada bulan September 1960. Mendapatkan tugas tambahan yaitu membawa bantalan rel kereta api sebanyak 11 buah untuk dipasang

di jembatan Lungia, Pasukan Kontingen Garuda II menggunakan kendaraan 1 Landrover dan 1 truk. Pada saat tiba di jembatan Lungia, LDT. Abong Suganti sebagai pemimpin patroli memerintahkan serta memberikan peringatan agar semua anggota tetap hati hati dan tidak ada yang keluar dari jalan karena di pinggir ruas jalan terdapat ranjau.



Gambar 6.4

Pasukan Kontingen Garuda II Sedang Memperbaiki Jembatan yang Rusak

Sumber: Buku Kontingen Garuda Indonesia Dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB

Setelah mendapatkan peringatan, semua bantalan rel kereta api dikeluarkan untuk dipasang pada lobang-lobang yang terdapat dibagian tengah jembatan karena sebagian jalan di jembatan Lungia telah berlobang akibat dihancurkan oleh pasukan Balubakakat pada bulan September 1960. Setelah pekerjaan selesai, kemudian anggota pasukan diperintahkan untuk mengamati kendaraan Landrover yang sedang bergerak. Sersd G. Simanjuntak bersama Dan Ton II berada di ujung jembatan untuk memberikan arah kepada kendaraan truk yang sedang bergerak. Saat kendaraan truk melaju diatas

jembatan tiba-tiba terjadi ledakan di sebelah kiri jembatan (dari arah Kabango menuju Kamina). Kemudian kendaraan truk berhenti di atas jembatan dan dua orang yang berada di dekat jembatan (bertugas mengawasi dan memberi arah pada kendaraan yang sedang bergerak) mengalami luka-luka ringan, dua orang tersebut adalah Sersd. G. Simanjuntak dan Prds. Syarif. Selain itu, terdengar orang yang berteriak di tengah-tengah asap ledakan yang terletak pada jarak 3 meter disebelah kiri jalan, setelah asap dari ledakan itu tidak ada baru diketahui bahwa Prds. Basari telah menjadi korban karena ledakan ranjau tersebut. Dilakukannya pemeriksaan jenazah dan juga yang mengalami luka-luka dilakukan pada tanggal 15 Desember 1960 dengan hasil sebagai berikut:

1. Almarhum Prds Basari, mendapatkan luka 1 lubang besar di pipi kiri dekat hidung dan mulut, 1 lubang besar di dada sebelah kiri (tepatnya pada jantung), 1 lubang di pergelangan tangan kiri, paha kiri dekat kemaluan, paha kanan bagian depan, paha kiri sebelah luar, kaki kiri bagian bawah serta luka dan robek di siku tangan kiri hingga tulang-tulangnya kelihatan.
2. Prds Syarif, mendapatkan luka kecil di pangkal paha kanan bagian belakang.
3. Sersd. G. Simanjuntak, mendapatkan luka 1 lubang kecil di tangan kanan.

Selain mendapatkan tugas untuk mengatasi peristiwa peristiwa yang terjadi di Republik Kongo, pasukan Kontingen Garuda II mendapatkan tugas patroli ke daerah-daerah yang rawan terjadinya pemberontakan seperti ke daerah Bikoro, Igende. Pasukan Kontingen Garuda II

berhasil menjalankan tugasnya dengan baik melalui pendekatan sosial seperti beradaptasi dengan masyarakat yang ada disana, bergaul atau berinteraksi baik dengan komandan dan pasukan tentara nasional Kongo sehingga misi yang dijalankan oleh Pasukan Kontingen Garuda II berjalan dengan lancar, dapat dibuktikan dari adanya pengakuan dari Panglima UNOC yaitu Jenderal Van Horn yang mengakui bahwa pelaksanaan tugas Garuda II dinilai sangat baik dan sukses, bahkan ia sangat terkesan atas prestasi yang dicapai oleh pasukan Kontingen Indonesia Garuda II. Pada tanggal 7 Mei 1961 pasukan Kontingen Garuda II selesai bertugas dan kembali ke Indonesia.



Gambar 6.5

**Pasukan Kontingen Garuda Sedang
Beristirahat di daerah Igende**

Sumber: Buku Kontingen Garuda Indonesia dalam
Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB

Pasukan Perdamaian Indonesia atau yang dikenal dengan Kontingen Garuda II ke Republik Kongo pada tahun 1960-1961 telah memberikan pengaruh dan dampak besar di Republik Kongo. Ketika Pasukan Perdamaian Indonesia berusaha untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Republik Kongo, kerap melakukan pendekatan lebih dengan masyarakat sekitar dengan cara melakukan rekreasi

di dalam kota. Hal ini bertujuan untuk mengetahui medan di daerah tersebut dan karakteristik masyarakat di Republik Kongo. Pasukan Kontingen Garuda II berusaha untuk lebih dekat lagi dengan pemimpin daerah maupun masyarakat sekitar dengan cara memperkenalkan salah satu budaya Indonesia yaitu budaya Gotong royong dengan mengadakan kerja bakti, membersihkan halaman-halaman tempat ibadah, rumah sakit dan yang lainnya. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pasukan mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat maupun para pejabat, karena dengan diadakannya kegiatan tersebut dalam lebih mempererat kerjasama, ketertiban antar masyarakat dengan para pejabat maupun tentara. Pasukan Kontingen Garuda II selain melakukan tugas patroli serta mengatasi pemberontakan, yakni memperbaiki fasilitas prasarana di Republik Kongo yang telah rusak akibat pemberontakan antar suku. Dapat dibuktikan dari Pasukan Kontingen Garuda II melakukan pemasangan bantalan rel di Jembatan Lungia, hal ini berdampak kepada masyarakat sekitar yakni bisa menggunakannya kembali jalan tersebut seperti semula. Pasukan perdamaian Indonesia ditugaskan kembali ke Republik Kongo pada tahun 1962.

SIMPULAN

Pasukan Perdamaian Indonesia yang bertugas ke Republik Kongo pada tahun 1960 di bawah naungan organisasi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikenal dengan *Opération des Nations Unies au Congo (ONUC)*. Dengan adanya organisasi tersebut karena

terjadi konflik di Republik Kongo yang bermula pada tahun 1960, lebih tepatnya ketika Republik Kongo mendapatkan kemerdekaan dari Belgia. Kemerdekaan tersebut adanya dorongan dari dunia Internasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendesak Pemerintah Belgia memberikan kemerdekaan. Pada kenyataannya Pemerintah Republik Kongo maupun masyarakatnya tidak merasakan kemerdekaan atau kebebasan yang seharusnya dirasakan, karena pemerintah Belgia masih menguasai daerah tersebut, karena wilayah Republik Kongo merupakan negara yang sangat kaya sumber daya alam salah satunya tembaga dan timah. Selain itu, para pejabat di pemerintahan dan Jendral militer masih dipimpin oleh orang Belgia dan yang terakhir adanya gerakan separatis di salah satu provinsi di Republik Kongo yaitu Katanga yang dipimpin oleh Tshombe. Gerakan tersebut didukung oleh pemerintah Belgia serta perusahaan pertambangan di Katanga yang dikenal dengan UMKH (*Union Minière du Haut-Katanga*). Permasalahan tersebut semakin kacau sehingga tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah Republik Kongo. Kemudian, presiden dan perdana menteri Republik Kongo meminta Bantuan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan atau mengatasi konflik yang terjadi di Republik Kongo.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat dalam pasukan perdamaian yang ditugaskan ke Republik Kongo pada tahun 1960. Hal ini merupakan salah bentuk implementasi dari kebijakan politik luar negeri bebas aktif serta Indonesia merupakan negara pelopor anti imperialisme dan kolonialisme di dunia

khususnya di Asia-Afrika. Maka dari itu, pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas ke Republik Kongo pada tahun 1960 disebut dengan pasukan Kontingen Garuda II, yang dipimpin oleh Letkol. Solihin Gautama Purwanegara. Pasukan tersebut tersebar ke beberapa wilayah yang sedang terjadi konflik seperti ke Provinsi Equateur, Katanga dan Boende. Tugas dijalankan oleh pasukan Garuda II di Kongo bermacam-macam, mulai dari menjaga kantor Supreme Commander, pengawalan uang dari Bank hingga mengatur lalu lintas. Pasukan ini berhasil menjalankan tugasnya dengan baik melalui pendekatan sosial seperti beradaptasi dengan masyarakat yang ada disana, bergaul atau berinteraksi baik dengan komandan dan pasukan tentara nasional Kongo sehingga misi yang dijalankan oleh Pasukan Kontingen Indonesia Garuda II berjalan dengan lancar, Pada tanggal 7 Mei 1961 pasukan Kontingen Indonesia Garuda II selesai bertugas dan kembali ke Indonesia, sampai di pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 23 Mei 1961. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

DAFTAR REFERENSI

- Ariyantoro. (2018). Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Universitas Negeri Surabaya, 6 (02), 160-174.
- Dahana, A, dkk. (2012). *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 7*. Jakarta: PT Ichtar Baru van Hoeve.
- Dinas Provost TNI Angkatan Darat. (1981). *Sejarah Pengabdian CORPS Polisi Militer Angkatan Darat*. Jakarta: Yayasan Gajah Mada.
- Imran, A. (1971). *Sedjarah Perkembangan Angkatan-Darat*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI.
- Siswojo. (1987). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud.
- Sjamsuddin. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Lusignan, B. (2003). *The Congo: From Leopold to Lumumba*. [Online]. Diakses dari: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK EwiRrdienPPeAhUMMo8KHT9eDm4 QFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fweb.stanford.edu%2Fclass%2Ffe297a%2FThe%2520Congo%2520From%2520Leopold%2520to%2520Lumumba.doc&usg=AOvVawo9Lx4hLrhJ5gc8FjYrgJ-f>
- Passemiers, L. (2016). *South Africa and the 'Congo Crisis', 1960-1965*. The Faculty of The Humanities at The University of The Free State.
- Surat Turunan Peninjauan Personil Angkatan Darat Komando Daerah Militer VI "Siliwangi" SP. 004/D/I/02. Bandung: Agustus 1960.
- Laporan Periodik No. SH-001/II/II/1960, Kamina: 5 November 1960.
- Laporan Umum Kesehatan Pasukan Garuda II Kontingen Indonesia Sejak Tanggal 20 Agustus 1960 – 30 November 1960.

Surat Risalah Kejadian No. P-02/II/1/191.
Kamina Base: 3 Januari 1961. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua.